

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam upaya penegakkan Hak Asasi Manusia dalam kasus agraria PT BSMI masih kurang optimal. Ada dua hal penting yang dihasilkan dalam penelitian ini, **pertama** proses konflik atau penyebab konflik sehingga memunculkan isu HAM dan **kedua** penelitian ini menghasilkan bagaimana peran pemerintah dalam upaya penegakkan HAM.

Penyebab konflik adalah sebagai berikut :

1. Kurang tegasnya pemerintah dalam penentuan batas kewenangan pengelolaan lahan.

Konflik kemudian terjadi setidaknya ada dua penyebabnya, pertama masyarakat pemilik tanah tidak dilibatkan secara langsung dalam musyawarah penentuan nilai harga tanah yang akan dibebaskan. Kedua, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pengukuran tanah. Hal tersebut menimbulkan kerancuan dalam klaim tanah yang telah diberikan kepada PT BSMI.

2. Perusahaan Mengabaikan pejanjian RKL, RPL dalam dokumen Amdal

Pengelolaan pertanahan memiliki aturan yang jelas dalam Undang-Undang. Perusahaan wajib menaati aturan yang berlaku agar tercipta pengelolaan yang

mensejahterakan masyarakat sekitar, tidak merusak ekosistem lingkungan sehingga tidak menyebabkan konflik.

3. Pemahaman dan kepastian tentang Hukum atau aturan berbeda

Kedudukan HGU dari tanah ulayat menjadi satu masalah paling kuat. Hukum mengenai agraria sering disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, khususnya untuk kepentingan modal atau pengusaha. Otoritas Negara dalam penguasaan tanah, pemerintah kemudian mulai mengambil lahan-lahan warga yang sebelumnya telah diklaim warga setempat dalam hukum adat masyarakat tersebut.

4. Prilaku arogansi aparat keamanan

Faktor ketiga adalah adanya tindakan arogansi yang dilakukan oleh aparat keamanan khususnya kepada masyarakat atau petani. Tindakan ini mencerminkan bahwa adanya keberpihakan aparat keamanan terhadap salah satu pihak, dan merugikan pihak lainnya.

5. Kendala Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mesuji

Sebagai DOB Pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan upaya penegakkan HAM tidak maksimal. Pemerintah belum memahami duduk persoalan yang sebenarnya dalam masalah ini, sehingga perdamaian yang diupayakan belum terwujud.

6. Pendidikan dan ekonomi masyarakat miskin

Faktor pendidikan dan ekonomi masyarakat miskin menjadi salah satu faktor penyebab dalam konflik ini. Masyarakat terjepit kebutuhan sehingga melakukan tuntutan-tuntutan yang harapannya mampu memberikan kesejahteraan kehidupan. Rendahnya pendidikan yang didapatkan karena tidak adanya aktifitas belajar

mengajar sampai di tingkat SMA yang seharusnya didapatkan namun tidak juga diberikan oleh pemerintah.

Peran Pemerintah adalah melakukan fungsi kontrol, pembinaan dan regulasi. Permasalahan yang dirasakan masyarakat Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning Kabupaten Mesuji mencoba melakukan upaya penegakkan HAM sebagai berikut :

1. Peran Kesbangpol

Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Kesbangpol mengumpulkan wakil-wakil masyarakat dan pimpinan perusahaan untuk melakukan mediasi serta berupaya memberikan keadilan dan kesejahteraan agar mencapai kesepakatan dan meminimalisir konflik. Namun, upaya mediasi ini selalu gagal menghasilkan kesepakatan bersama sehingga konflik terus terjadi.

2. Peran pengawasan pemerintah terhadap perlakuan buruh

Pemerintah memiliki kewajiban mengontrol investor-investor yang masuk dan sistem kinerja serta manajemen yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan keadilan buruh. Sejauh ini berbagai pihak khususnya masyarakat menyatakan pemerintah acuh terhadap konflik yang sudah terjadi sejak awal masa pembebasan lahan hingga kasus penembakan.

3. Peran pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap perusahaan dan masyarakat

Pemerintah memang melakukan berbagai upaya untuk mengurai konflik sampai tahap penyelesaian. Namun, hingga saat ini kebijakan-kebijakan yang di sosialisasikan kepada masyarakat selalu ditolak sebab masyarakat tidak tahu

kejelasan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah kepada perusahaan demi mensejahterakan masyarakatnya. Masyarakat menilai kebijakan yang diberikan masyarakat cenderung memihak kepada perusahaan.

4. Proses regulasi ditolak masyarakat

Masyarakat sudah sangat trauma dibohongi oleh perusahaan dan selama ini pemerintah seolah berpihak pada perusahaan. Masyarakat mengemukakan banyak kebijakan pemerintah tidak adil terhadap mereka dengan menolak beberapa penyelesaian yang diupayakan pemerintah seperti tidak menyetujui kesepakatan jumlah KK yang ditolak oleh pemerintah.

B. Saran

Penelitian ini banyak sekali menemukan fakta-fakta baru yang mampu memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya-upaya penegakan Hak Asasi Manusia yang diindikasikan terjadi di Kabupaten Mesuji oleh perusahaan PT BSMI di tiga desa yaitu Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning.

Penelitian ini pula menunjukkan kepada masyarakat, perusahaan dan pemerintah yang sudah berupaya saling menuntut hak dan memenuhi kewajiban masing-masing pihak untuk mencapai kesejahteraan bersama. Penelitian ini pula memberikan kesimpulan bahwa pemerintah dan perusahaan sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya perdamaian kepada pihak-pihak yang dirugikan terutama masyarakat namun belum optimal.

Saran dari peneliti yang bisa dipertimbangkan adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Mesuji sebaiknya tegas dalam penentuan batas pengelolaan lahan.
2. Perusahaan sebaiknya tidak mengabaikan RPL dan RKL dalam dokumen Amdal.
3. Sebaiknya pemahaman dan kepastian atas hukum lebih diperjelas dan di informasikan kepada masyarakat.
4. Aparat penegak hukum sebaiknya tidak melakukan tindakan arogansi kepada masyarakat.
5. Sebagai DOB Pemerintah Kabupaten Mesuji sebaiknya meninjau kembali dan lebih dalam kedudukan masalah dalam kasus ini.
6. Pemerintah sebaiknya memberikan alternatif upaya perbaikan ekonomi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dan memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat.
7. Pemerintah Kabupaten Mesuji sebaiknya melakukan formulasi kebijakan yang lebih kongkrit untuk kesejahteraan masyarakat desa pribumi.
8. Pemerintah menunjuk dan mewajibkan perusahaan untuk melakukan manajemen yang berpihak kepada masyarakat sekitar.
9. Pemerintah Kabupaten Mesuji sebaiknya terus mengkaji dan melakukan pengecekan kepada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan HGU.
10. Sebaiknya ada aturan jelas dari pemerintah kepada perusahaan yang sosialisasikan kepada masyarakat mengenai sistem plasma dan adanya

dana CSR yang diperuntukan khusus untuk fasilitas umum dan kebutuhan desa.

11. Pemerintah sebaiknya melakukan kontroling untuk mengontrol manajemen perusahaan dalam sistem karyawan dan buruh serta pengelolaan pertanian yang berpihak pada lingkungan.
12. Pemerintah sebaiknya melakukan kebijakan keras kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola HGU yang tidak berpihak pada masyarakat sekitar dan mengembalikan pada masyarakat untuk mengelola bersama.